

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun 2015 anggaran belanja negara Indonesia diarahkan untuk pendanaan program prioritas, utamanya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Pidato Jokowi, Sidang Paripurna, 2017). Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia hingga kini telah mencapai 1.099 kilometer (km), yang terdiri atas 40 ruas tol. Angka itu melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sepanjang 1.060 km sebagai wujud nyata terlaksanannya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam data yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan dan BPJT tahun 2018 yang dimuat dalam infografis oleh Tirto.id, didapati bahwa prediksi pada tahun 2030 trafik kendaraan diprediksi menembus 61.800 kendaraan perhari, naik 50% dari 2016 sebesar 40.886 kendaraan perhari. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun semakin meningkat kebutuhan moda transportasi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan moda transportasi antar daerah dan semakin bertambah pula panjang jalan tol di setiap tahunnya, apakah diiringi dengan ketersediaan fasilitas rest areanya?

Kesehatan dan keselamatan adalah kebutuhan mutlak setiap manusia yang harus dipenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika berkendara dalam waktu yang lama dapat menyebabkan tubuh kelelahan hingga rasa kantuk yang tak tertahankan. Salah satu bentuk upaya pelayanan oleh pemerintah yang tersedia adalah dengan pengadaan fasilitas-fasilitas umum berupa Rest Area yang tersebar di sepanjang ruas jalan tol. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol, fasilitas rest area dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Rest Area tipe A yang memiliki sarana dan prasarana paling lengkap disediakan paling sedikit 1 untuk setiap jarak 50 km. Jarak tipe A dengan tipe A berikutnya paling sedikit 20 km. Rest Area tipe B disediakan paling sedikit 1 untuk jarak 30 km. Jarak minimum antara tipe B dengan tipe B berikutnya adalah 10 km. Rest Area tipe C (Optional) adalah rest area yang hanya

difungsikan ketika libur lebaran, natal dan tahun baru saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengatur Jalan Tol 2019 yang dimuat dalam media social instagram bpjt_info, didapati bahwa pada tahun 2019 total ada 95 rest area yang bisa ditemukan dengan rincian 48 rest area Tipe A, 23 rest area Tipe B, dan 24 rest area Tipe C disepanjang ruas jalan tol Trans Jawa.

Rest Area yang tersebar di berbagai daerah disepanjang pulau jawa akan bernilai lebih dari sebuah rest area biasa ketika mampu menjadi rest area yang memberi pelayanan yang baik sekaligus sebagai penanda arsitektur daerahnya. Setiap daerah memiliki kelokalan arsitektur dan potensi khas daerah yang berbeda beda. Baik dari langgam arsitektur, kuliner, pakaian, dan kesenian tiap daerah memiliki nilai khas yang berbeda. Jika hal ini mampu dikemas dalam suatu desain kawasan rest area yang baru tidak menutup kemungkinan Rest area dapat berfungsi juga sebagai icon suatu kota.

Pengembangan Rest Area Menjadi Terminal Logistik atau Barang

Berdasarkan perluasan fungsi rest area tersebut akan diatur melalui revisi Peraturan Menteri PUPR No.10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. Terdapat 4 konsep pengembangan rest area yang tengah dikaji BPJT dengan melibatkan stakeholder terkait. Salah satu potensi pengembangan Rest Area pada KM 487 adalah menambahkan fungsi sebagai logistik perhubungan atau terminal logistik/barang. Mengangkat fungsi tersebut dengan alasan dapat memecahkan masalah mengenai regulasi transportasi ke dalam kota. Selain itu dapat memperoleh nilai-nilai social ekonomi dari adanya kegiatan yang berhubungan dengan transportasi logistik.

1.2 Rumusan Masalah

Rest Area KM 487 sebagai fasilitas umum peristirahatan pada jalan tol juga sebagai destinasi wisata kuliner dan menyediakan fasilitas terminal logistik untuk kawasan industri terdekat yaitu daerah Sukoharjo. Dari latar belakang diatas muncul berbagai permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana menciptakan kawasan Rest Area yang memadai serta nyaman?
- b. Bagaimana menciptakan kawasan Rest Area yang memiliki multifungsi yaitu peristirahatan dan tempat untuk perpindahan logistik suatu kawasan industri?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini adalah untuk Mengembangkan Rest Area KM 487 yang menghadirkan tempat beristirahat pengguna jalan tol dan memecahkan permasalahan transportasi logistik.

1.3.2 Ruang Lingkup

Hal-hal yang akan dibahas dalam Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bangunan fasilitas public di Jalan Tol Semarang-Solo yakni kawasan rest area.

1.5 Metode Pembahasan

1.5.1 Metode Deskriptif

Metode deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari studi pustaka/literature, data dari instansi/dinas terkait, observasi lapangan, serta browsing internet.

1.5.2 Metode Dokumentatif

Metode dokumentatif dilakukan dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan dalam penulisan LP3A dengan cara memperoleh gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan secara online maupun langsung.

1.5.3 Metode Studio Besaran Ruang

Metode studi besaran ruang dilakukan dengan melakukan survey terhadap pariwisata aquarium yang sudah ada secara online. Survey kemudian ditelaah dan dianalisa mengenai latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik dan kondisi yang ada.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan penyusunan LP3A ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai literatur tentang tinjauan umum pariwisata aquarium.

BAB III TINJAUAN LOKASI

Berisi mengenai tinjauan Kota Boyolali dan sekitarnya, kebijakan rencana tata ruang wilayah, serta tinjauan umum wilayah yang dipilih sebagai lokasi.

BAB IV PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi mengenai pendekatan dan perhitungan terhadap aspek-aspek perencanaan dan perancangan arsitektur dalam aspek fungsional dan kontekstual.